

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

YOLLA ENENDIA EFENDI PUTRI
C100140025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

YOLLA ENENDIA EFENDI PUTRI

C. 100. 140. 025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardani, S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**


(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari, Sabtu, 3 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U ()
(Ketua Dewan Penguji)

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H., M.H ()
(Anggota I Dewan Penguji)

Anggota : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan di daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Januari 2018

Penulis



Yolla Enendia Efendi Putri

C. 100. 140. 025

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)**

ABSTRAK

Perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, banyak Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat (atasan) dan hal tersebut harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar barulah mengajukan gugatan di Pengadilan. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat dan prosedur akan dikenakan sanksi disiplin oleh Pejabat atasan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan alasan yang mendasari permohonan perceraian dikabulkan serta pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan akibat hukum dari perceraian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, yang mempergunakan sumber hukum sekunder yaitu literature dan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena menjelaskan secara teliti tentang proses perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil wajib untuk membuat izin permohonan perceraian kepada atasan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Dalam pembuktian terbukti bahwa benar perkawinan tersebut terjadi pertengkaran dan tidak dapat rukun kembali karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain. Dalam putusannya, hakim mengabulkan perceraian dengan verstek. Akibat hukum dari penelitian ini adalah tidak adanya hubungan hukum antara suami istri dan tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan anak.

Kata kunci: Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Permohonan Izin, Pengadilan

ABSTRACT

Divorce can be done by a wife by filing a lawsuit to the District Court or to the Religious Courts. In practice, many civil servants experience divorce. A civil servant who will perform a divorce must obtain a permit from an officer (superior) and it must be filed in writing with the basic reason before filing a lawsuit in the Court. Civil Servants who do not meet the requirements and procedures will be subject to disciplinary sanction by the superior's Official. The purpose of this study is to know the procedures and reasons underlying the divorce application granted and judge's consideration of divorce cases for Civil Servants and legal consequences of divorce. This research uses normative juridical approach because investigated is legal aspect, legal principle, rule of law, using secondary law source that is literature and primary law material that is legislation. The nature of this research is descriptive research because it explains carefully about the process of divorce. The result of this research is Civil Servant obliged to make permission of divorce request to superiors to be able to file lawsuit in Court. In proving it is true that the marriage is right there is an argument and can not get along again

because the Defendant has a relationship with another woman. In the verdict, the judge granted a divorce with *verstek*. The legal consequence of this research is the absence of legal relationship between husband and wife and the defendant has no obligation to finance the life of the child.

Keywords: Divorce of Civil Servant, Permission Application, Court

1. PENDAHULUAN

Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka, berkata bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Dalam membentuk sebuah keluarga dapat dimulai dengan adanya hubungan perkawinan antara pria dan wanita. Islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang. Perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.²

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tajwid* dan merupakan

¹ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal. 1

² Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, Hal.9

ucapan seremonial yang sakral.³ Pengertian perkawinan juga dapat ditemukan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang perkawinan dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁵ Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil yang memutuskan untuk melakukan perceraian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Penjelasan mengenai perceraian dapat ditemui dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Alasan-alasan perceraian tersebut adalah karena kematian, perceraian dan karena keputusan pengadilan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselingkuhan.

Perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama dan perceraian juga dapat dilakukan oleh suami dengan cara mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama.

Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya terjadi kepada masyarakat umum saja tetapi Pegawai Negeri Sipil juga banyak yang mengalami perceraian. Untuk perceraian Pegawai Negeri Sipil terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil. Didalam

³ M. A. Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 8

⁴ Hilman Hadi Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, cet ke-1, hal. 22

⁵ K. Wanjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : :Ghalia Indonesia, cet. Ke-4, hal. 15

Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat (atasan) dan hal tersebut harus diajukan secara tertulis serta dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.⁶ Setelah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian mendapat izin barulah mengajukan gugatan di Pengadilan.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur permohonan izin Pegawai Negeri Sipil dan apa yang menjadi alasan permohonan tersebut dikabulkan? (2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menentukan pembuktian dan putusan mengenai perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? (3) Bagaimana akibat hukum setelah terjadi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

Manfaat penelitian ini adalah Manfaat bagi Penulis (1) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai proses penyelesaian perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (2) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil terkait dengan prosedur perceraian yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat dijadikan pedoman. (3) Diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang mengatur mengenai prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. METODE

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder dan dilakukan dengan menekankan dan berpegangan pada segi-segi yuridis. Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap proses penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum/legalitas tentang proses

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

penyelesaian perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus Pengadilan Agama Surakarta).

Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah (1) Data Sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi : (a) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan yang diperoleh secara langsung untuk melengkapi penelitian penulis. (b) Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer, yaitu literature yang ada kaitannya dengan penelitian. (2) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang akan diteliti.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Permohonan Izin dan Alasan Dikabulkannya Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Proses pengajuan permohonan izin bercerai ini merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena, didalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan permohonan izin kepada Pejabat atasan akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permohonan izin yang diajukan kepada pejabat atasan harus disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai. Setelah adanya pengajuan izin perceraian sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa setiap atasan wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Alasan-alasan dalam permohonan izin perceraian yang dijadikan pedoman pejabat atasan dalam melakukan pertimbangan tersebut yaitu: 1) Pasangan berzina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 2) Salah satu pihak meninggalkan

⁷ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 35

pasangannya Selma dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atas penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.⁸

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permohonan izin kurang meyakinkan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Setelah memperoleh izin. Barulah Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama.

3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Surakarta dalam Menentukan Pembuktian Mengenai Perkara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pada gugatan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Nomor : 0549/Pdt.G/2014/PA.Ska dalam pembuktian yang mengajukan bukti hanyalah Penggugat. Penggugat mengajukan (1) Bukti Surat yaitu Kutipan Akta Nikah dan KTP (2) Bukti Saksi.

Dalam pembuktian tersebut akhirnya hakim membuat kesimpulan dalam menentukan pembuktian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara 0549/Pdt.g/2014/PA.Ska adalah sebagai berikut bahwa gugatan cerai Penggugat memang benar dan diakui oleh Tergugat dengan dibuktikan dengan bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 agustus 2000 dibuktikan dengan dikeluarkannya akta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Pada bukti saksi menyatakan bahwa semua yang terdapat dalam gugatan cerai penggugat benar adanya. Didalam pembuktian ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sehingga, dikarenakan dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti atau menjawab gugatan cerai Penggugat Tergugat dianggap

⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Makmun selaku hakim di Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa 7 November 2017 pukul 08.00 WIB

membenarkan dan menerima apa yang telah disampaikan penggugat dalam Gugatan cerai Penggugat.

3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Surakarta dalam Menentukan Putusan Mengenai Perkara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Setelah adanya pembuktian dari Penggugat maupun Tergugat kemudian hasil dari pembuktian tersebut dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan yang akan digunakan dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam putusan, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan verstek. Hakim melihat bahwa apa yang dijadikan dasar gugatannya sesuai dengan fakta yang ada dan tidak mengada-ada. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik itu bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi yang ada, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang ada pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara Nomor : 0549/Pdt.G/2014/PA.Ska, penulis sepakat atas apa yang telah menjadi dasar sebagai alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dan alasan-alasan perceraian sebagaimana pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perbuatan yang dilakukan sepasang suami istri sesuai dengan alasan-alasan perceraian maka hubungan perkawinan itu harus diputuskan.

3.4 Akibat Hukum Setelah Terjadi Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

3.4.1 Akibat hukum terhadap anak

Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah bahwa Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, Pengadilan dapat menetapkan ibu yang bertanggung jawab memikul beban tersebut.

Dalam perkara perceraian ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak/keturunan hasil dari perkawinannya tersebut. Sehingga, bapak dalam perkara

ini sebagai Tergugat tidak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak.

3.4.2 Akibat hukum terhadap Istri

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 istri berhak atas nafkah yang diberikan oleh bekas suami. Tetapi, dalam hal ini Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 karena Penggugat yang mengajukan cerai maka Penggugat tidak berhak atas nafkah yang diberikan bekas suami.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian penulis melakukan pembahasan berupa uraian-uraian terhadap penelitian Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Prosedur Permohonan Izin Pegawai Negeri Sipil dan alasan permohonan izin perceraian dikabulkan. Perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diajukan Penggugat ini harus terlebih dahulu melalui proses berupa pengajuan permohonan izin perceraian kepada Pejabat atasan. Permohonan izin yang diajukan kepada pejabat atasan harus disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai. Setelah adanya pengajuan izin perceraian, bahwa setiap atasan wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permohonan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri sipil yang mengajukan permohonan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Dalam penelitian ini permohonan izin perceraian dikabulkan oleh atasan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali dan Tergugat telah mempunyai hubungan dengan bekas

pacarnya dulu. setelah permohonan izin dikabulkan barulah Penggugat mengajukan surat Gugatan ke Pengadilan Agama.

Kedua, Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan mengenai perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil ini Penggugat mengajukan 2 bukti yaitu bukti surat dan saksi. Dalam pembuktiannya terbukti benar bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali serta Tergugat terbukti mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu bekas pacarnya. Dalam pembuktian ini hanya Penggugat yang mengajukan bukti dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Pada perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor : 0549/Pdt.G/2014/PA.Ska Hakim dalam memutuskan perceraian sesuai dengan Pasal 116 KHI jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sehingga terjadi perselisihan terus menerus dan Tergugat telah melakukan hubungan dengan bekas pacarnya terdahulu. Sehingga Hakim menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 16 Agustus 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Serta menyatakan semua biaya perkara yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat.

Ketiga, akibat hukum setelah terjadi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akibat hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil pada perkara nomor : 0549/Pdt.G/2014/PA.Ska adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri dan sesuai dengan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak berhak atas sebagian gaji dari bekas suaminya karena perceraian ini dilakukan atas kehendak istri sendiri.

Akibat terhadap anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggung oleh Bapak. Dan kedua orang tua berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anak. Tetapi dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil pada perkara nomor : 0549/Pdt.G/2014/PA.Ska Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai seorang anak. Sehingga Tergugat tidak mempunyai tanggungan untuk memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan anaknya.

4.2 Saran

Pertama, bagi pihak yang membuat Peraturan sebaiknya peraturan mengenai Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini tidak hanya diatur didalam Peraturan Pemerintah tetapi juga diatur didalam Undang-Undang.

Kedua, bagi Pegawai Negeri Sipil sebaiknya tidak dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai karena didalam kehidupan masyarakat Pegawai Negeri Sipil dijadikan panutan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar angka perceraian tidak semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia
- Hadi Kusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Nawawi, Hadar, 1991, *Metode Penelitian Hukum Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Saleh, K. Wanjik, 1976, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soetami, Siti 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada